



RENJA

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan A. Yani No. 01 Telp. (0526) 2028408 Paringin
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71662

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Sekretariat Daerah sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Semakin besar kewenangan Sekretariat Daerah tersebut, semakin beragam pula kondisi lingkungan yang perlu dicermati secara seksama untuk mengeliminir kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itulah maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuannya.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan anggaran di Sekretariat Daerah agar lebih efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Paringin, Januari 2024

Sekretaris Daerah,



Drs. H. Sutilno, AP., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 28 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 31 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 39 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 51 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 52 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah | 55 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 58 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 60 |
| BAB V. PENUTUP | 72 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2024.

Dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021- 2026 Pemerintah Kabupaten Balangan.

Semua Dokumen Perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengacu kepada Renja pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (RKUA) APBD didasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

- Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
 24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi pemerintah Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini diantaranya adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan antar Bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan 5 (lima) tahunan. Dalam proses tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 ini adalah tahapan Pertama dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian.

Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar bangsa.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun dengan memperkuat kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Namun demikian, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian.

Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar bangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi

saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata.

Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah tantangan.

Masalah kebudayaan dalam arti yang seluasnya dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi

semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranatapradata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pengurangan kesenjangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 - 2026 yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten Balangan yaitu:

“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Perwujudan pelaksanaan misi ke-4 tersebut menjadi Visi dari Sekretariat Daerah yang juga merupakan visi dari RPJMD 2021-2026 yaitu:

**”Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan
Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”**

Pencapaian Visi Sekretariat Daerah tersebut dengan melaksanakan misi dan tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu **terwujudnya tata kelola perumusan kebijakan dan koordinasi pemerintahan yang efektif.**

Indikator Tujuan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP;
2. Indeks Pelayanan Publik;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Nilai EKPPD.

Pencapaian tujuan Sekretariat Daerah tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat. Adapun Sasaran tersebut adalah **meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi.**

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target disampaikan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2021-2026 | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi | Nilai SAKIP Kabupaten | | | BB =72.4 | BB =74.4 | BB =76.4 | BB =78.2 |
| | | | Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Nilai Budaya Kerja Kabupaten | | | 79,51 | 79,51 | 79,51 | 79,51 |
| | | | Nilai IKM kabupaten | | | 83.70 | 84.00 | 84.50 | 85.00 |
| | | | Nilai SAKIP SETDA | | | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 72,40 |

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah merupakan program yang disusun berdasarkan kebutuhan akan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Sekretariat dalam tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang menunjang keberhasilan pencapaian misi ke-4 Kepala Daerah yang tertuang dalam Kebijakan umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Sekretariat sebagai salah satu SKPD yang mendukung pencapaian misi ke-4 Kepala daerah kabupaten Balangan dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju kepada *good governance* dan *clear government*. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai.

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Program Kegiatan Prioritas Pendukung sasaran RPJMD
Kabupaten Balangan Tahun 2024

| No. | Sasaran RPJMD | Indikator Kinerja (Outcome) | Target 2024 | Sasaran SKPD | IKU SKPD | Target 2024 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Unit Penanggungjawab | |
|---|---|---|-------------|---|---|-------------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi | Nilai SAKIP Kabupaten | BB=74,4 | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi | Nilai SAKIP Kabupaten | BB=74,4 | Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Bagian Organisasi | |
| | | | | | | | Kegiatan: Penataan Organisasi | | |
| | | | | | | | Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | |
| | | Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi | 100% | | Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi | 100% | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | |
| | | Nilai Budaya Kerja Kabupaten | 79,51 | | Nilai Budaya Kerja Kabupaten | 79,51 | | | |
| | | Nilai IKM kabupaten | 84.00 | | Nilai IKM kabupaten | 84.00 | Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | Bagian Pemerintahan |
| | | Nilai SAKIP SETDA | 72,40 | | Nilai SAKIP SETDA | 72,40 | Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan | | |
| Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2022. Evaluasi Renja 2022 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretaris Daerah, realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 disampaikan pada tabel 2.1

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan dan sebanyak 4 (empat puluh satu) kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan namun terdapat 5 (lima) kegiatan diantaranya realisasi capaian melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Sekretariat Daerah pada periode 2022-2026 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

| Kode | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13=12/7x100% | 14=6+12 | 15=14/5x100% | 16 |
| | | | K | K | K | K | K | K | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 2 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 Laporan | 6 Laporan | 100,00 | 6 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | 100,00 | | 0,00 | |
| | | | Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ktentuan Yang Berlaku | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang / Bulan | 89 Orang / Bulan | 89 Orang / Bulan | 100,00 | 89 Orang / Bulan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 12 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP | 0 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 0,00 | |
| 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 1 Paket | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 2 Paket | 1 Paket | 50,00 | 1 Paket | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 1 Paket | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | Disediakan | | | | | | | |
| 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 1 Paket | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 1 Paket | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 1 Paket | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 467 Laporan | 467 Laporan | 100,00 | 467 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 91,67 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 16,67 | |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 12 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 12 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 12 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 12 Bulan | 16,67 | |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 Unit | 50 Unit | 50 Unit | 100,00 | 50 Unit | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 100,00 | 20 Unit | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100,00 | 3 Unit | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100,00 | 3 Unit | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100,00 | 3 Unit | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 Orang / Bulan | 2 Orang / Bulan | 1 Orang / Bulan | 50,00 | 1 Orang / Bulan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 1 Paket | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 Orang / Bulan | 2 Orang / Bulan | 2 Orang / Bulan | 100,00 | 2 Orang / Bulan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 83,33 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | Nilai Komposit Kelembagaan | 80 Nilai | 80 Nilai | 80 Nilai | 100,00 | 80 Nilai | 100,00 | |
| | | Nilai IKM Bagian dan UPP yang Bernilai Baik | 0 Nilai | 80 Nilai | 80 Nilai | 100,00 | 80 Nilai | inf | |
| | | Nilai RB Area Akuntabilitas | 0 Nilai | 80 Nilai | 80 Nilai | 100,00 | 80 Nilai | inf | |
| 4.01.01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dokumen | 65 Dokumen | 65 Dokumen | 100,00 | 65 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik | Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100,00 | 4 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------|-----------|-----------|---|---------------|---------------|--------------------|
| | | dan Tata Laksana | | | | | | | |
| 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 4 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 1 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 1 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100,00 | 5 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%) | 100,00 | 57,58 | |
| | | | | | | Predikat Kinerja (Kegiatan) | Sangat Tinggi | Rendah | |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%) | 100 % | 100 % | 75 % | 75,00 | 75 % | 75,00 | |
| | | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%) | 100 % | 100 % | 75 % | 75,00 | 75,00 % | 75,00 | |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 4 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 2 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 | 3 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| | Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| | Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00 | 5 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 | 3 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 2 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| | Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Dokumen | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 100,00 | 500 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 0 Kasus | 10 Kasus | 10 Kasus | 100,00 | 10 Kasus | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Dokumen | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 100,00 | 500 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti | 60 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00 | 10 Dokumen | 16,67 | |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00 | 10 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 79,17 | |
| Predikat Kinerja (Kegiatan) | | | | | | Sangat Tinggi | | Tinggi | |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD | 100 % | 100 % | 75 % | 75,00 | 75 % | 75,00 | |
| | | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi | 100 % | 100 % | 75 % | 75,00 | 75,00 % | 75,00 | |
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 4 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100,00 | 4 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.03.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%) | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |

| | | | Predikat Kinerja (Sub Kegiatan) | | | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | |
|-----------------|---|--|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------|
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Bahan Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % | 100,00 | 100 % | 100,00 | |
| 4.01.03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 4 Dokumen | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2022 yang disampaikan di atas dapat dijelaskan bahwa 8 (delapan) kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi capaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Sebanyak 8 (Delapan) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran. Sejumlah 8 (delapan) kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang tidak menunjang secara langsung pencapaian IKU SKPD sehingga tidak tercapainya target kinerjanya tidak mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Sebanyak 41 (empat puluh satu) kegiatan dalam pelaksanaan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun kegiatan dengan realisasi kinerja 100% adalah dapat dilihat pada tabel 2.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah.

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Sebanyak 5 (lima) kegiatan yang realisasi capaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu:

- 1) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.
- 3) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- 4) Kegiatan kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah.
- 5) Kegiatan penanganan kasus pengaduan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dari 5 (lima) kegiatan yang capainnya melebihi target di tahun 2020 merupakan kegiatan rutin yang tidak terkait langsung dengan

capaian IKU Sekretariat Daerah. Pencapaian target yang melebihi dari rencana target ini menyebabkan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2022 meningkat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tercapainya target kinerja lebih cepat dari perencanaan pencapaian target kinerja 5 tahunan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Penyebab tidak terpenuhinya target adalah sebagai berikut:**
 - Tidak meratanya kemampuan PNS dalam perencanaan di dalam Setda itu sendiri;
 - Rendahnya kemampuan PNS dalam menyusun indikator kinerja yg tepat syarat;
 - Kualitas SPIP di SKPD masih rendah;
 - Pencapaian kinerja masih diukur melalui capaian serapan anggaran bukan hasil/ output dari penggunaan anggaran tersebut;
 - Kebiasaan menunda pekerjaan oleh pelaksanaan program/ kegiatan yang akhirnya menyebabkan pelaksanaan program/ kegiatan terhambat.

- **Penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:**
 - Penyusunan perencanaan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi;
 - Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dengan fokus pada pencapaian target kinerja nyata;
 - Dilaksanakannya rencana aksi dan angkas sesuai jadwal yang direncanakan;

- **Penyebab terpenuhinya target kinerja melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:**
 - Ketidakmampuan dalam menyusun target kinerja di awal Renstra;

- Tidak tersedianya data awal saat menyusun perencanaan target kinerja sehingga menyusun target kinerja;
- Adanya perubahan yang meningkat secara signifikan dari target awal Renja.

Program/ kegiatan yang target kinerjanya tidak tercapai atau melebihi target kinerja program dan kegiatannya tidak menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra, dikarenakan program/ kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan rutin yang tidak menunjang secara langsung pencapaian IKU SKPD sehingga tidak mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun target kinerja harus sudah di rumuskan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* lingkup Sekretariat Daerah;
2. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja;
3. Perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang disajikan melalui tabel 2.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Persentase Capaian Urusan Pemerintahan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Nilai komponen Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (bobot nilai) | | | 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,60 | 10,48 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah | | | 85% | 88% | 90% | 90% | 82,65% | 82,92% | 90% | 92% | |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi | | | 91,70% | 91,75% | 91,80% | 91,85% | 91,75% | 91,75% | 91,80% | 91,85% | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan cakupan tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah. Keberadaan Sekretariat Daerah dalam jajaran unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah.

Sejauh ini kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah. Sekretariat Daerah memiliki peran yang penting dalam proses sinergitas program dan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ini terlihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menuju pada tercapainya tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah berperan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan daerah sendiri melakukan penilaian terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK). Yang mana indikator ini tersebar pada seluruh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dilaksanakan oleh SKPD tersebut dan disampaikan setiap tahun

dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD dan kemudian dikompilasi menjadi LPPD Kabupaten Balangan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. LPPD ini juga menjadi dasar dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Balangan terhadap pelaksanaan anggaran setelah tahun anggaran berakhir. LPPD tersebut akan dinilai oleh tim daerah dan tim Nasional. Hasil dari penilaian ini disampaikan dalam bentuk nilai EKPPD yang mana penilaian ini menjadi *gengsi* Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai hasil prestasi pelaksanaan program kegiatan untuk peningkatan pembangunan daerah.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Nilai EKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 hingga tanggal 17 Juli 2022 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi LPPD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan Validasi Terhadap Hasil EPPD Tim Daerah Atas LPPD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Se Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 2 September 2020 Nilai EKPPD Kabupaten Balangan tahun 2019 adalah 3,5620. Sedangkan nilai EKPPD tahun 2016 adalah 3,1393, tahun 2017 adalah 3,0671, tahun 2018 adalah 3,2946. Nilai EKPPD tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bagian Pemerintahan untuk melakukan verifikasi data IKK yang dikumpul oleh SKPD tepat waktu dan tepat regulasi. Pola pengumpulan data dan pengecekan kebenaran data dukung telah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan sesuai dengan SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan EKPPD mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk peningkatan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Balangan diukur dengan indikator-indikator utama pada setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Bagian di Sekretariat Daerah yang memiliki tugas pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) lingkup Kabupaten Balangan. Bagian Organisasi memiliki tugas melakukan harmonisasi LKIP SKPD sebagai bahan penyusunan LKIP Kabupaten. Hasil penilaian LKIP SKPD menjadi tolak ukur pencapaian Visi Misi SKPD tersebut. Sedangkan LKIP Kabupaten menjadi tolak ukur pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yang mana kedua penilaian ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain.

Hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaporan kinerja Kabupaten Balangan oleh Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 65,45 atau predikat “B” Dibandingkan dengan capaian tahun lalu terdapat peningkatan sebesar 4,29%. Yaitu dari nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat “B” meningkat menjadi 65,45 dengan predikat “B”.

Nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat “B” yang didapatkan Kabupaten Balangan di tahun lalu yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome*) pada Pemerintah Kabupaten Balangan Hal

tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Balangan untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun - tahun mendatang;

- 3) Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi adalah dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan. Perolehan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2019 sebesar 48.09 yang merupakan angka realisasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan melalui aplikasi PMPRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia IRB Kabupaten Balangan adalah 51,84 atau kategori CC dengan rincian total komponen pengungkit (A) 20,35 dan total komponen hasil (B) 31,49.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai *leading sector* dan seluruh Pemerintah Kabupaten Balangan. Sejak Tahun 2018 pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Balangan sudah dilaksanakan, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan melalui Bagian Organisasi Sekretariat. SKPD yang termasuk dalam area perubahan dan tim telah dapat menyusun Dokumen Road Map RB yang meliputi delapan area diantaranya Penataan Kelembagaan, Penataan SDM, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik tetapi penguatan dalam area perubahan masih ada hal hal yang perlu diperbaiki.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi didasarkan dari penilaian komponen pengungkit terdiri atas 8 subansi atau 8

area perubahan, sedangkan komponen hasil terdiri dari 3 substansi. Adapun penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Komponen Penilaian (Pengungkit 60%) | Nilai Maksimal | Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020 | |
|-----|---------------------------------------|----------------|--|--------------|
| | | | Nilai | % |
| 1. | Manajemen Perubahan | 5 | 1,12 | 22,40 |
| 2. | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5 | 2,09 | 41,80 |
| 3. | Penataan dan Pengutan Organisasi | 6 | 4,50 | 75,00 |
| 4. | Penataan Tatalaksana | 5 | 1,72 | 34,40 |
| 5. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15 | 3,62 | 24,13 |
| 6. | Penguatan Akuntabilitas | 6 | 2,00 | 33,33 |
| 7. | Penguatan Pengawasan | 12 | 4,37 | 36,41 |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6 | 1,30 | 21,67 |
| | Jumlah | 60 | 20,72 | 34,53 |

| No. | Komponen Penilaian (Hasil 40%) | Nilai Maksimal | Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020 | |
|-----|--|----------------|--|--------------|
| | | | Nilai | % |
| 1. | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20 | 12,37 | 61,85 |
| 2. | Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | 10 | 10 | 100,00 |
| 3. | Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 5,00 | 50,00 |
| | Jumlah | 40 | 27,37 | 68,43 |

| No. | Komponen Penilaian | Nilai Maksimal | Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020 | |
|-----|--------------------|----------------|--|--------------|
| | | | Nilai | % |
| 1. | Pengungkit | 60 | 20,72 | 34,53 |
| 2. | Hasil | 40 | 27,37 | 68,43 |
| | Jumlah | 100 | 48,09 | 48,09 |

- 4) Sebagai SKPD yang memberikan pelayanan koordinasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Balangan Sekretariat Daerah melalui 9 (Sembilan) Bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang khas melaksanakan tugas secara maksimal memberikan pendampingan dan pembinaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai garis koordinasinya masing-masing. Seperti SKPD lain yang juga memberikan pelayanan Sekretariat Daerah juga melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Sekretariat Daerah tidak hanya sebagai koordinasi pelayanan kepada SKPD terkait pelayanan

Administratif namun juga pelayanan kepada masyarakat umum dalam hal pelayanan sosial seperti Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Bagian Perekonomian dan Bagian Humas.

Penilaian peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah diambil dari rata-rata hasil penilaian pelayanan 9 (Sembilan) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Capaian pada tahun lalu adalah sebesar 87,37% dari target yang ingin dicapai sebesar 88% dengan capaian indikator adalah 99,28%. Target yang ingin dicapai s.d tahun 2024 adalah IKM terhadap pelayanan Sekretariat daerah sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja Renstra (s.d tahun 2024) sudah mencapai 94,97%. Nilai ini didapat dari hasil koesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan pada sekretariat daerah dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No.14 Tahun 2017. Diharapkan tahun 2024 target capaian IKM pelayanan Sekretariat Daerah sudah dapat mencapai target yang diharapkan. Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik optimis bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan karena Kabupaten Balangan siap unyuk melakukan Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Pengertian masalah/ hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan/ hambatan yang terdapat di Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tidak meratanya sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan pemerintahan yang berkembang;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- c. Berubahnya peraturan/ regulasi dan dasar kebijakan yang mengatur tertib administrasi;
- d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya pendukung tugas dan fungsi;

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak lepas dari peran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terutama SKPD pengampu Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut. Sekretariat Daerah sendiri menjadi pengampu Misi 4 Kepala Daerah yakni

” Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Misi ke-4 Kepala Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya nilai EKPPD;
- 3) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.

Ketiga sasaran ini dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap Bagian pada Sekretariat Daerah. Adapun pengampu dari 3 sasaran ini adalah Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Bagian Organisasi. Dari seluruh pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran ini semuanya menyajikan capaian 100%. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penataan Organisasi;
- 2) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;

3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan prioritas dapat dilihat pada tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat

Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, kemungkinan untuk menang (mencapai tujuan) untuk mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan dengan kesempatan, waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan semangat/ motivasi untuk melakukan/ mencapai tujuan. Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (*internal*) dan luar (*eksternal*) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersedia dan tersebar nya sumber daya manusia/ aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu;
- b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat;
- c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP
- d. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Balangan;
- e. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi.

5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formulasi isu-isu penting dalam hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* dan otonomi daerah yang bertanggungjawab;
- b. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;
- c. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Balangan yaitu dalam pencapaian misi meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan.

Rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Daerah sampai tahun 2024 terkait dengan program prioritas/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Adapun Hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi Renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-----|---|---|----------------------|-------------------|----------------------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran | Balangan | 100% | Rp 70.226.602.459 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran | Balangan | 100% | Rp 70.226.602.459 |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%) | Balangan | 100% | Rp 1.520.496.500 | Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%) | Balangan | 100% | Rp 1.520.496.500 |
| | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Balangan | 2 Dokumen | Rp 1.437.061.500 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Balangan | 2 Dokumen | Rp 1.437.061.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|
| Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Balangan | 1 Laporan | Rp 83.435.000 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Balangan | 1 Laporan | Rp 83.435.000 |
| Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%) | Balangan | 100% | Rp 17.891.465.447 | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%) | Balangan | 100% | Rp 17.891.465.447 |
| Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan) | Balangan | 92 Orang/Bulan | Rp 17.543.965.747 | Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan) | Balangan | 92 Orang/Bulan | Rp 17.543.965.747 |
| Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Balangan | 1 Dokumen | Rp 153.465.100 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Balangan | 1 Dokumen | Rp 153.465.100 |
| Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Balangan | 1 Laporan | Rp 82.279.800 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Balangan | 1 Laporan | Rp 82.279.800 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|-------------------|---|--|----------|-----------|-------------------|
| Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | Balangan | 4 Laporan | Rp 111.754.800 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | Balangan | 4 Laporan | Rp 111.754.800 |
| Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP | Balangan | 100% | Rp 439.670.000 | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP | Balangan | 100% | Rp 439.670.000 |
| Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Balangan | 1 Paket | Rp 439.670.000 | Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Balangan | 1 Paket | Rp 439.670.000 |
| Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%) | Balangan | 100% | Rp 16.114.955.900 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%) | Balangan | 100% | Rp 16.114.955.900 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Balangan | 2 Paket | Rp 712.383.600 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Balangan | 2 Paket | Rp 712.383.600 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 3.916.598.800 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 3.916.598.800 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.967.927.000 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.967.927.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|------------------|---|--|----------|-------------|------------------|
| Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.086.944.300 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.086.944.300 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.503.046.200 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.503.046.200 |
| Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Balangan | 467 Laporan | Rp 6.928.056.000 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Balangan | 467 Laporan | Rp 6.928.056.000 |
| Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) | Balangan | 12 Bulan | Rp 9.306.806.300 | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) | Balangan | 12 Bulan | Rp 9.306.806.300 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 3.571.999.000 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 3.571.999.000 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 2.281.090.000 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 2.281.090.000 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 3.453.717.300 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 3.453.717.300 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|-------------------|---|---|----------|----------|-------------------|
| Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) | Balangan | 12 Bulan | Rp 15.432.523.100 | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) | Balangan | 12 Bulan | Rp 15.432.523.100 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Balangan | 50 Unit | Rp 4.147.311.800 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Balangan | 50 Unit | Rp 4.147.311.800 |
| Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Balangan | 1 Unit | Rp 1.096.666.600 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Balangan | 1 Unit | Rp 1.096.666.600 |
| Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 5.358.265.800 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 5.358.265.800 |
| Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 2.651.902.900 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 2.651.902.900 |
| Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 2.178.376.000 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 2.178.376.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|------------------|--|--|----------|---------------|------------------|
| Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya | Balangan | 100% | Rp 3.962.463.512 | Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya | Balangan | 100% | Rp 3.962.463.512 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Balangan | 2 Orang/Bulan | Rp 2.542.463.512 | Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Balangan | 2 Orang/Bulan | Rp 2.542.463.512 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.020.000.000 | Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.020.000.000 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Balangan | 2 Orang | Rp 400.000.000 | Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Balangan | 2 Orang | Rp 400.000.000 |
| Kegiatan : Penataan Organisasi | Indeks Komposit Kelembagaan | Balangan | P-4 | Rp 2.188.247.000 | Kegiatan : Penataan Organisasi | Indeks Komposit Kelembagaan | Balangan | P-4 | Rp 2.188.247.000 |
| | Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Lengkap | | 100% | | | Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Lengkap | | 100% | |
| | Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik | | 84 | | | Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik | | 84 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|---|---|----------|------------------|------------------|
| | Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik | | 100% | | | Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik | | 100% | |
| | Nilai Laporan Kinerja Pemda | | 14,26 | | | Nilai Laporan Kinerja Pemda | | 14,26 | |
| | Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB | | 75,76% (25 SKPD) | | | Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB | | 75,76% (25 SKPD) | |
| | Nilai IPP SKPD Sampel | | Prima (A) | | | Nilai IPP SKPD Sampel | | Prima (A) | |
| | Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik | | 36,36% (12 SKPD) | | | Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik | | 36,36% (12 SKPD) | |
| Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Balangan | 65 Dokumen | Rp 575.212.000 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Balangan | 65 Dokumen | Rp 575.212.000 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Balangan | 4 Laporan | Rp 411.240.000 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Balangan | 4 Laporan | Rp 411.240.000 |
| Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Balangan | 4 Dokumen | Rp 1.201.795.000 | Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Balangan | 4 Dokumen | Rp 1.201.795.000 |
| Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 3.369.974.700 | Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 3.369.974.700 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Balangan | 1 Laporan | Rp 1.195.187.300 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Balangan | 1 Laporan | Rp 1.195.187.300 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Balangan | 1 Laporan | Rp 1.194.419.000 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Balangan | 1 Laporan | Rp 1.194.419.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|------------------|---|---|----------|-----------|-------------------|
| Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Balangan | 5 Laporan | Rp 980.368.400 | Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Balangan | 5 Laporan | Rp 980.368.400 |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/ditera pkan oleh SKPD (%) | Balangan | 100% | ##### | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diter apkan oleh SKPD (%) | Balangan | 100% | Rp113.277.199.300 |
| | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%) | | 100% | | | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%) | | 100% | |
| Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD | Balangan | 100% | Rp 1.637.530.100 | Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD | Balangan | 100% | Rp 1.637.530.100 |
| Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Balangan | 4 Dokumen | Rp 1.094.210.600 | Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Balangan | 4 Dokumen | Rp 1.094.210.600 |
| Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Balangan | 2 Dokumen | Rp 332.567.500 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Balangan | 2 Dokumen | Rp 332.567.500 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Balangan | 3 Dokumen | Rp 210.752.000 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Balangan | 3 Dokumen | Rp 210.752.000 |
| Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana | Balangan | 100% | ##### | Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp110.018.247.200 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|-------------------|--|---|----------|-----------|-------------------|
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Balangan | 5 Dokumen | Rp 20.625.744.200 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Balangan | 5 Dokumen | Rp 20.625.744.200 |
| Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Balangan | 3 Dokumen | Rp 82.156.892.000 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Balangan | 3 Dokumen | Rp 82.156.892.000 |
| Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Balangan | 2 Dokumen | Rp 7.235.611.000 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Balangan | 2 Dokumen | Rp 7.235.611.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|------------------|--|---|----------|-------------|------------------|
| Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indeks Kualiatas Kebijakan | Balangan | 55 | Rp 1.172.107.400 | Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indeks Kualiatas Kebijakan | Balangan | 55 | Rp 1.172.107.400 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Balangan | 500 Dokumen | Rp 656.827.900 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Balangan | 500 Dokumen | Rp 656.827.900 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Balangan | 10 Kasus | Rp 341.727.500 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Balangan | 10 Kasus | Rp 341.727.500 |
| Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Balangan | 500 Dokumen | Rp 173.552.000 | Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Balangan | 500 Dokumen | Rp 173.552.000 |
| Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi | Balangan | 10 Dokumen | Rp 449.314.600 | Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi | Balangan | 10 Dokumen | Rp 449.314.600 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Balangan | 10 Dokumen | Rp 449.314.600 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Balangan | 10 Dokumen | Rp 449.314.600 |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD | Balangan | 100% | Rp 4.398.688.400 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD | Balangan | 100% | Rp 4.398.688.400 |
| | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi | | 100% | | | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi | | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|------------------|--|--|----------|-----------|------------------|
| Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 1.302.638.200 | Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 1.302.638.200 |
| Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Balangan | 4 Dokumen | Rp 218.680.000 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Balangan | 4 Dokumen | Rp 218.680.000 |
| Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Balangan | 4 Laporan | Rp 539.239.500 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Balangan | 4 Laporan | Rp 539.239.500 |
| Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Balangan | 1 Dokumen | Rp 438.397.700 | Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Balangan | 1 Dokumen | Rp 438.397.700 |
| Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Balangan | 1 Dokumen | Rp 106.321.000 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Balangan | 1 Dokumen | Rp 106.321.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------------|---|--|----------|-----------|------------------|
| Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Persentase Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 1.002.809.200 | Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Persentase Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 1.002.809.200 |
| Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Balangan | 4 Dokumen | Rp 307.985.000 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Balangan | 4 Dokumen | Rp 307.985.000 |
| Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Balangan | 1 Laporan | Rp 308.363.200 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Balangan | 1 Laporan | Rp 308.363.200 |
| Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Balangan | 4 Laporan | Rp 386.461.000 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Balangan | 4 Laporan | Rp 386.461.000 |
| Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola PBJ | Balangan | 50 | Rp 1.889.037.000 | Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola PBJ | Balangan | 50 | Rp 1.889.037.000 |
| Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Balangan | 1 Dokumen | Rp 421.474.700 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Balangan | 1 Dokumen | Rp 421.474.700 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|------------------|--|--|----------|-----------|------------------|
| Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Balangan | 1 Dokumen | Rp 1.016.817.400 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Balangan | 1 Dokumen | Rp 1.016.817.400 |
| Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Balangan | 5 Orang | Rp 450.744.900 | Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Balangan | 5 Orang | Rp 450.744.900 |
| Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 204.204.000 | Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 204.204.000 |
| Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Balangan | 1 Dokumen | Rp 40.123.000 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Balangan | 1 Dokumen | Rp 40.123.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|----------------|---|--|----------|-----------|----------------|
| Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi) | Balangan | 1 Dokumen | Rp 102.452.000 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi) | Balangan | 1 Dokumen | Rp 102.452.000 |
| Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Balangan | 1 Dokumen | Rp 61.629.000 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Balangan | 1 Dokumen | Rp 61.629.000 |

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menghasilkan usulan kebutuhan kegiatan. Hasil itu selanjutnya dibahas lagi dalam Musrenbang dengan stakeholder untuk mengevaluasi apakah usulan tersebut memang merupakan kegiatan yang benar-benar diperlukan di masyarakat. Stakeholder yang terlibat antara lain LSM, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi profesi, kelompok/ forum informasi masyarakat, dan sebagainya. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat Daerah Tahun 2024

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|-------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 sudah mengacu kepada Kemendagri 050 Tahun 2021 yang telah menjabarkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan SKPD pengampu dari program kegiatan yang di maksud, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2024. Tahun 2024 Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu belanja operasi sebesar **Rp. 241.173.544.111,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tjup Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sebelas Rupiah)**. Termasuk di dalamnya adalah belanja untuk pemenuhan gaji dan tunjangan baik untuk pegawai Sekretariat Daerah dan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta belanja bantuan keuangan hibah untuk organisasi keagamaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Balangan di tahun 2024.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|----|----|------|----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran | Balangan | 100% | Rp 110.993.120.011 | APBD | 100% | Rp 65.363.803.873 |
| 4 | 01 | 01 | 2,01 | | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%) | Balangan | 100% | Rp 1.520.496.500 | APBD | 100% | Rp 2.021.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Balangan | 2 Dokumen | Rp 1.437.061.500 | APBD | 2 Dokumen | Rp 1.937.565.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Balangan | 1 Laporan | Rp 83.435.000 | APBD | 6 Laporan | Rp 83.435.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%) | Balangan | 100% | Rp 17.891.465.447 | APBD | 100% | Rp 17.293.233.971 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------|----------------|-------------------|------|------------|-------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan) | Balangan | 92 Orang/Bulan | Rp 17.543.965.747 | APBD | 12 Bulan | Rp 16.946.428.971 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Balangan | 1 Dokumen | Rp 153.465.100 | APBD | 1 Dokumen | Rp 163.983.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Balangan | 1 Laporan | Rp 82.279.800 | APBD | 1 Laporan | Rp 92.430.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Balangan | 4 Laporan | Rp 111.754.800 | APBD | 12 Laporan | Rp 90.382.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP | Balangan | 100% | Rp 439.670.000 | APBD | 100% | Rp 321.725.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Balangan | 1 Paket | Rp 439.670.000 | APBD | 1 Paket | Rp 321.725.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%) | Balangan | 100% | Rp 31.218.841.300 | APBD | 100% | Rp 16.242.265.890 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Balangan | 2 Paket | Rp 1.238.543.600 | APBD | 2 Paket | Rp 752.888.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------|-------------|-------------------|------|-------------|------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 8.647.318.000 | APBD | 1 Paket | Rp 3.916.617.190 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 11.100.378.500 | APBD | 1 Paket | Rp 1.967.933.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.801.499.000 | APBD | 1 Paket | Rp 1.086.945.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.503.046.200 | APBD | 1 Paket | Rp 1.529.080.200 |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Balangan | 467 Laporan | Rp 6.928.056.000 | APBD | 467 Laporan | Rp 6.988.802.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) | Balangan | 12 Bulan | Rp 12.706.606.300 | APBD | 12 Bulan | Rp 9.800.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 6.656.999.000 | APBD | 12 Laporan | Rp 4.000.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 2.595.890.000 | APBD | 12 Laporan | Rp 2.300.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Balangan | 1 Laporan | Rp 3.453.717.300 | APBD | 12 Laporan | Rp 3.500.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----------|----------|-------------------|------|----------|-------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) | Balangan | 12 Bulan | Rp 35.326.619.252 | APBD | 12 Bulan | Rp 15.649.770.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Balangan | 50 Unit | Rp 12.888.464.800 | APBD | 50 Unit | Rp 2.618.384.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Balangan | 1 Unit | Rp 1.097.138.600 | APBD | 20 Unit | Rp 1.209.500.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 16.002.077.000 | APBD | 3 Unit | Rp 7.613.200.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 3.160.562.852 | APBD | 3 Unit | Rp 2.030.310.500 |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Balangan | 1 Unit | Rp 2.178.376.000 | APBD | 3 Unit | Rp 2.178.376.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,11 | | Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya | Balangan | 100% | Rp 3.962.463.512 | APBD | 100% | Rp 2.944.503.512 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|--|----------|------------------|------------------|------|------------|------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2,11 | 01 | Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Balangan | 2 Orang/Bulan | Rp 2.542.463.512 | APBD | 12 Bulan | Rp 2.544.503.512 |
| 4 | 01 | 01 | 2,11 | 02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Balangan | 1 Paket | Rp 1.020.000.000 | APBD | 1 Paket | Rp - |
| 4 | 01 | 01 | 2,11 | 04 | Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Balangan | 2 Orang | Rp 400.000.000 | APBD | 2 Orang | Rp 400.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 | | Kegiatan : Penataan Organisasi | Indeks Komposit Kelembagaan | Balangan | P-4 | Rp 2.188.247.000 | APBD | P-4 | Rp 2.988.247.000 |
| | | | | Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Langkap | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | | Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik | | 84 | | 84 | | | | |
| | | | | Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | | Nilai Laporan Kinerja Pemda | | 14,26 | | 14,26 | | | | |
| | | | | Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB | | 75,76% (25 SKPD) | | 75,76% (25 SKPD) | | | | |
| | | | | Nilai IPP SKPD Sampel | | Prima (A) | | Prima (A) | | | | |
| | | | | Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik | | 36,36% (12 SKPD) | | 36,36% (12 SKPD) | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 | 01 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Balangan | 65 Dokumen | Rp 575.212.000 | APBD | 65 Dokumen | Rp 575.212.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----------|-----------|--------------------|------|-----------|-------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2,13 | 02 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Balangan | 4 Laporan | Rp 411.240.000 | APBD | 4 Laporan | Rp 411.240.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 | 03 | Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Balangan | 4 Dokumen | Rp 1.201.795.000 | APBD | 4 Dokumen | Rp 2.001.795.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | | Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 5.738.710.700 | APBD | 100% | Rp 2.103.058.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | 01 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Balangan | 1 Laporan | Rp 2.485.194.300 | APBD | 1 Laporan | Rp 1.026.087.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | 02 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Balangan | 1 Laporan | Rp 1.550.070.000 | APBD | 1 Laporan | Rp 456.125.000 |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 | 03 | Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Balangan | 5 Laporan | Rp 1.703.446.400 | APBD | 5 Laporan | Rp 620.846.000 |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%) | Balangan | 100% | Rp 125.556.079.700 | APBD | 100% | Rp 84.373.888.721 |
| | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%) | | 100% | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 | | Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD | Balangan | 100% | Rp 1.712.530.500 | APBD | 100% | Rp 1.281.377.900 |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Balangan | 4 Dokumen | Rp 1.169.211.000 | APBD | 4 Dokumen | Rp 646.938.200 |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Balangan | 2 Dokumen | Rp 332.567.500 | APBD | 2 Dokumen | Rp 425.847.700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|----------|-------------|--------------------|------|-------------|-------------------|
| 4 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Balangan | 3 Dokumen | Rp 210.752.000 | APBD | 3 Dokumen | Rp 208.592.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp 121.542.127.200 | APBD | 100% | Rp 81.275.175.821 |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Balangan | 5 Dokumen | Rp 20.625.744.200 | APBD | 5 Dokumen | Rp 1.902.307.821 |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Balangan | 3 Dokumen | Rp 93.680.772.000 | APBD | 3 Dokumen | Rp 73.711.627.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Balangan | 2 Dokumen | Rp 7.235.611.000 | APBD | 2 Dokumen | Rp 5.661.241.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indeks Kualiatas Kebijakan | Balangan | 55 | Rp 1.852.107.400 | APBD | 55 | Rp 1.273.180.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Balangan | 500 Dokumen | Rp 656.827.900 | APBD | 500 Dokumen | Rp 656.828.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Balangan | 10 Kasus | Rp 1.021.727.500 | APBD | 10 Kasus | Rp 442.800.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---|---|----------|----------------|----|---------------|------|----------------|---------------------|
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Balangan | 500 Dokumen | Rp | 173.552.000 | APBD | 500 Dokumen | Rp 173.552.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi | Balangan | 10 Dokumen | Rp | 449.314.600 | APBD | 10 Dokumen | Rp 544.155.000 |
| 4 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Balangan | 10 Dokumen | Rp | 449.314.600 | APBD | 10 Dokumen | Rp 544.155.000 |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD | Balangan | 100% | Rp | 4.624.344.400 | APBD | 100% | Rp 4.636.609.000 |
| | | | | Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi | | 100% | | 100% | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp | 1.352.338.200 | APBD | 100% | Rp 1.268.574.500 |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Balangan | 4 Dokumen | Rp | 230.910.000 | APBD | 4 Dokumen | Rp 218.680.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Balangan | 4 Laporan | Rp | 560.559.500 | APBD | 4 Laporan | Rp 539.239.500 |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Balangan | 1 Dokumen | Rp | 444.887.700 | APBD | 1 Dokumen | Rp 404.334.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|----------|-----------|----|---------------|------|-----------|---------------------|
| 4 | 01 | 03 | 2,01 | 05 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Balangan | 1 Dokumen | Rp | 115.981.000 | APBD | 1 Dokumen | Rp 106.321.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Persentase Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp | 1.128.409.200 | APBD | 100% | Rp 1.325.276.500 |
| 4 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Balangan | 4 Dokumen | Rp | 307.985.000 | APBD | 4 Dokumen | Rp 460.198.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Balangan | 1 Laporan | Rp | 433.963.200 | APBD | 1 Laporan | Rp 403.095.700 |
| 4 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Balangan | 4 Laporan | Rp | 386.461.000 | APBD | 4 Laporan | Rp 461.982.800 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola PBJ | Balangan | 50 | Rp | 1.889.037.000 | APBD | 50 | Rp 1.890.135.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Balangan | 1 Dokumen | Rp | 421.474.700 | APBD | 1 Dokumen | Rp 421.475.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Balangan | 1 Dokumen | Rp | 1.016.817.400 | APBD | 1 Dokumen | Rp 1.017.915.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------|-----------|----|-------------|------|-----------|-------------------|
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Balangan | 5 Orang | Rp | 450.744.900 | APBD | 6 Orang | Rp 450.745.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana | Balangan | 100% | Rp | 254.560.000 | APBD | 100% | Rp 152.623.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Balangan | 1 Dokumen | Rp | 56.636.000 | APBD | 1 Dokumen | Rp 40.123.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi) | Balangan | 1 Dokumen | Rp | 123.915.000 | APBD | 1 Dokumen | Rp 112.500.000 |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 03 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Balangan | 1 Dokumen | Rp | 74.009.000 | APBD | 1 Dokumen | Rp - |

Paringin, September 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. Sutikno, AP., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Sekretariat Daerah pada tahun 2024, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan *guidance* di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi.

Akhir kata, semoga penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program/ kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Paringin, September 2023

SEKRETARIS DAERAH,



H. Sutikno, Ap., M.AP

Pembina Utama Madya (IV/D)

NIP. 19760417 199412 1 001